

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya (Bintoro Tjokroamidjojo). Konseptualisasi pembangunan merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera sehingga terdapat beberapa cara untuk menentukan tingkat kesejahteraan pada suatu negara.

Infrastruktur adalah suatu kondisi fisik yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam lingkup sosial dan ekonomi. Jika dilihat secara teknik, arti dari infrastruktur adalah aset fisik yang dirancang dengan sedemikian rupa dalam sistem, sehingga dari sistem tersebut mampu memberikan pelayanan publi. Indikator tolak ukur keberhasilan dalam suatu negara adalah adanya pembangunan infrastruktur. Menurut American Public Works Association (Stone, 1974 Dalam Kodoatie,R.J.,2005), Infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Pengelompokan sistem insfrastruktur dapat dibedakan menjadi (Grigg, 2000 dalam Kodoatie,R.J.,2005) : grup keairan, grup distribusi dan produksi energi, grup komunikasi, grup transportasi (jalan, rel), grup bangunan, grup pelayanan transportasi (stasiun, terminal, bandara, pelabuhan, dll), grup pengelolaan limbah. Menurut (Pangouw Diane. 2003) infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan nasional merupakan prasyarat utama yang akan melandasi keberhasilan dalam proses pembangunan Indonesia. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya dipandang sebagai bagian dari proses tetapi juga merupakan bagian tujuan, dimana partisipasi merupakan salah satu indikator tingkat

keberhasilan khususnya program pembangunan desa. Oleh karena itu partisipasi dapat berfungsi ganda, yaitu sebagai alat untuk menyelenggarakan pembangunan dan sebagai tujuan pembangunan itu sendiri. Konsep pembangunan dengan pendekatan partisipasi masyarakat dapat memberikan beberapa keuntungan antara lain.

1. Pembangunan akan lebih mengakar dalam masyarakat sehingga kelestarian hasil pembangunan tersebut lebih terjamin,
2. Pembangunan menjadi lebih murah karena masyarakat juga menanggung sebagian atau seluruh biaya proyek pembangunan tersebut, dan
3. Peranan pemerintah atau organisasi non pemerintah hanya sebatas sebagai fasilitator sedangkan inisiatif berasal dari masyarakat.

Lin Herlina (2003) juga menambahkan bahwa keuntungan lain dari partisipasi adalah meningkatkan kemampuan (*empowerment*) dalam pengertian meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga mereka mampu berinisiatif sendiri dan mempengaruhi proses dan hasil pembangunan, meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga mereka mampu mengambil tanggung jawab dalam pengelolaan proyek pembangunan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas proyek. Sehingga dapat diketahui bahwa infrastruktur merupakan indikator yang memiliki peran dalam pembangunan pada suatu desa/kelurahan. Pembangunan desa/kelurahan adalah bagian integral dari pembangunan nasional atau merupakan fungsi yang berpengaruh dalam kesinambungan suatu secara nasional. Keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan desa memiliki dukungan yang sangat besar dari masyarakat, sehingga dapat diartikan bahwa dari dukungan tersebut menghasilkan keterlibatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Peran partisipasi masyarakat sangat menunjang berjalannya pembangunan, tanpanya pembangunan akan sulit mencapai keberhasilan yang diharapkan. Dalam berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dapat memberikan nilai positif secara substantif, dimana pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta akan menghasilkan kepuasan tersendiri dan memperoleh dukungan masyarakat yang kuat terhadap perwujudan program-program pemerintah desa.

Kota Blitar sendiri memiliki situasi pembangunan infrastruktur yang belum merata. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan dan tenaga pemerintah dalam mengkoordinir pembangunan. Sehingga dari hal tersebut, dalam melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan potensi pembangunan, pemerintah Kota Blitar menciptakan program Blitar Keren (Keberagaman, Religius dan Nasionalis) yang tercatat dalam program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Blitar Tahun 2021-2026. Program Blitar Keren juga memiliki dasar hukum Perwali No. 46 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan melalui program Blitar Keren agar masyarakat meningkatkan potensi pembangunan daerah tingkat Kelurahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan sosial dan ekonomi kreatif, serta pemenuhan fasilitas kebutuhan masyarakat terkait sarpras lingkungan Kelurahan. Terdapat tujuh (7) prinsip pelaksanaan program Blitar Keren yang meliputi partisipatif, transparan, akuntabel, tertib, taat aturan, bermanfaat, dan berkelanjutan. Bentuk kegiatan program Blitar Keren terdiri atas 70% fisik dan 30% non fisik. Nantinya kegiatan tersebut akan di awasi oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang bertugas membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dengan swadaya gotong royong.

Program tersebut menghasilkan program yang digerakkan dalam lingkup Rukun Tetangga (RT) yang disebut program RT Keren. Perwujudan program ini dilakukan dengan pembentukan Kelompok Masyarakat (POKMAS) yang dilibatkan oleh Lurah. Kelompok masyarakat berkedudukan di wilayah RW setempat. Kelompok Masyarakat (POKMAS) sendiri merupakan suatu kelompok yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kepentingan atau tujuan yang sama dalam suatu lingkup tertentu, seperti lingkungan, kesehatan, atau pembangunan. POKMAS dapat terbentuk secara formal atau informal, dan dapat memiliki berbagai macam tujuan, seperti memperjuangkan hak-hak masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, atau membangun kapasitas masyarakat untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi di lingkungan mereka. POKMAS dapat menjadi mitra pemerintah dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan, dan dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pembangunan. Kelompok masyarakat (POKMAS) menjadi salah satu elemen yang sangat berperan dalam pembangunan, dimana keterlibatan kelompok masyarakat (POKMAS) menjadi salah satu yang sangat dibutuhkan, karena kehadiran dari POKMAS sebagai penampung setiap aspirasi dan keluhan yang dirasa dari setiap kelompok masyarakat atau masyarakat sekitar. Maka dari itu, kelompok masyarakat (POKMAS) merupakan sebuah media penyampaian harapan, pikiran dan tujuan yang tertampung dan terangkum melalui kebebasan berpendapat, berkumpul dan mendiskusikan pikiran, didalam sebuah forum dan akan dilaksanakan dalam aksi nyata lewat kerjasama dengan kelompok masyarakat.

Kelurahan Bendo menjadi salah satu kelurahan di kota Blitar yang juga dibentuk Kelompok Masyarakat (POKMAS). Terdapat 9 (sembilan) POKMAS yang tersebar di Kelurahan Bendo. Pembentukan POKMAS sendiri didasari atas kurang terpenuhinya kebutuhan akan terpenuhinya sarana umum dan infrastruktur yang memadai, serta rendahnya partisipasi masyarakat menjadi dorongan bagi pemerintah untuk mengadakan program ini. Meski lokasi penelitian berada di kota, namun secara fisik masih terdapat kondisi dimana sarana infrastruktur tidak berjalan dengan baik, seperti drainase yang tersumbat dan jalan yang sudah memiliki banyak retakan. Sehingga dengan adanya POKMAS ini pemerintah mampu mempercepat proses pembangunan melalui partisipasi masyarakat. Oleh karena itu peneliti ingin mengkaji bagaimana pengaruh yang dihasilkan atas peran Kelompok Masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur, sehingga peneliti dapat melihat seberapa besar efektivitas program pembentukan pokmas dalam berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diuraikan rumusan masalah penelitian sebagai berikut

1. Bagaimana peran Kelompok Masyarakat (POKMAS) dalam program pembangunan infrastruktur Kelurahan Bendo?
2. Seberapa besar pengaruh yang dihasilkan dari peran Kelompok Masyarakat (POKMAS) terhadap program pembangunan infrastruktur di Kelurahan Bendo?

1.3. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka dapat diketahui tujuan dan sasaran penelitian yang meliputi:

1.3.1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran dan seberapa besar pengaruh dari Kelompok Masyarakat (POKMAS) terhadap pembangunan infrastruktur di Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar.

1.3.2. Sasaran

Sasaran dari penelitian ini yaitu meliputi;

1. Mengetahui peran kelompok masyarakat terhadap tahap program pembangunan infrastruktur Kelurahan Bendo,
2. Menilai seberapa besar pengaruh keterlibatan dari peran kelompok masyarakat terhadap program pembangunan infrastruktur Kelurahan Bendo.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi ruang lingkup materi yang menjelaskan batasan-batasan pembahasan materi dan ruang lingkup lokasi yang menjelaskan terkait titik lokasi penelitian.

1.4.1. Ruang Lingkup Materi

Adapun ruang lingkup materi dalam penelitian ini membahas batasan-batasan materi sebagai berikut.

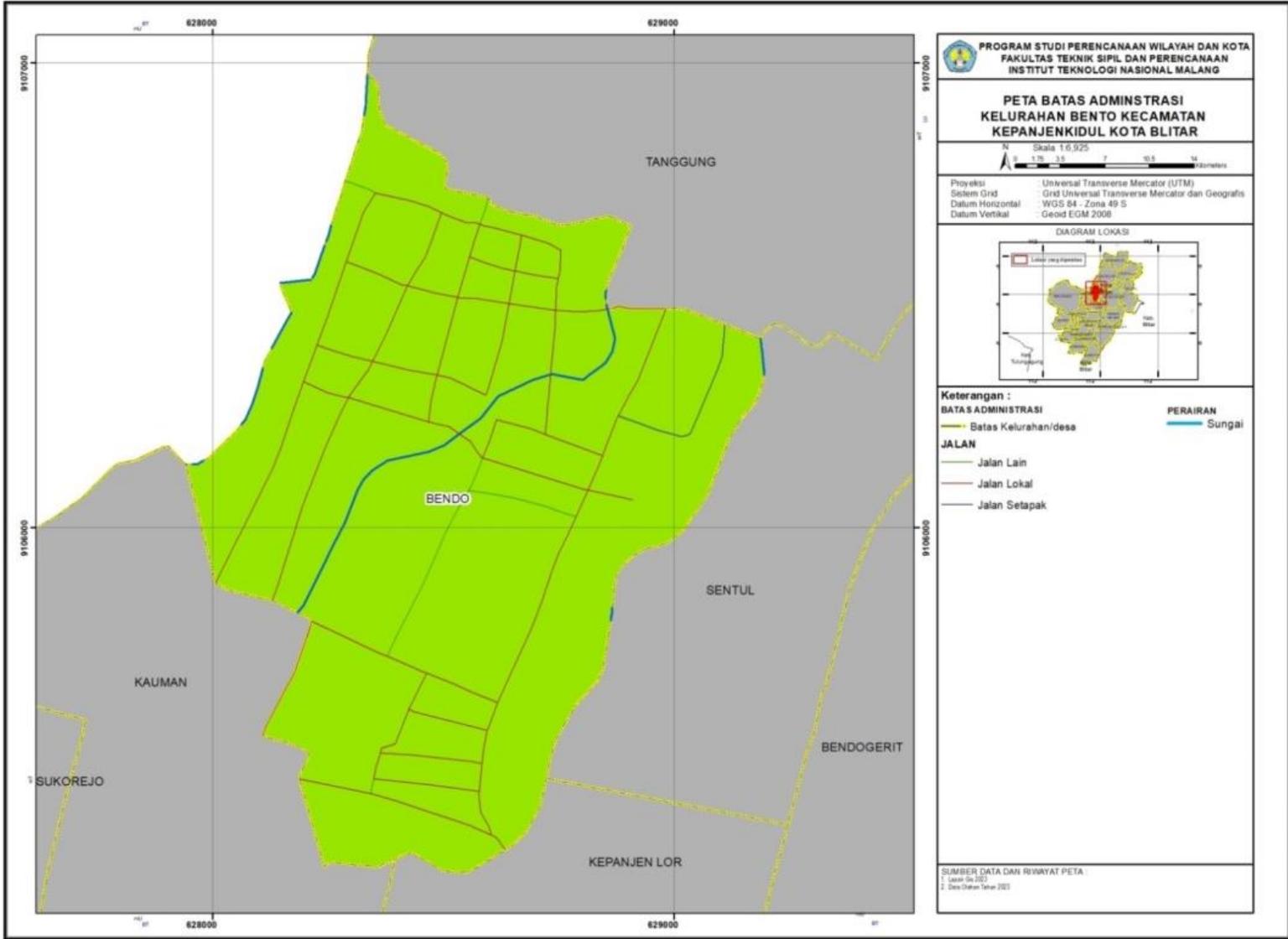
1. Mendeskripsikan pengertian dan konsep dasar Kelompok Masyarakat (POKMAS) dan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Bendo,
2. Mendeskripsikan teori-teori yang mendukung pengaruh Kelompok Masyarakat (POKMAS) terhadap rencana pembangunan infrastruktur kelurahan Bendo, dan
3. Mengidentifikasi tingkat peran Kelompok Masyarakat (POKMAS) serta pengaruhnya terhadap program pembangunan infrastruktur di Kelurahan Bendo.

1.4.2. Ruang Lingkup Lokasi

Ruang lingkup lokasi penelitian terdapat di Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar. Kelurahan Bendo memiliki luas 1.52 km². Kelurahan Bendo memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kelurahan Tanggung
- Sebelah selatan : Kelurahan Kepanjenlor
- Sebelah timur : Kelurahan Sentul
- Sebelah barat : Dusun Sumberjo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar

Pada Kelurahan Bendo dihuni oleh 6312 penduduk yang terbagi atas 3164 laki-laki dan 3148 perempuan dengan total KK 2082. Kelurahan Bendo terdiri atas 9 (semilan) RW dan 28 (dua puluh delapan) RT.



Peta 1. 1 Batas Administrasi Kelurahan Bendo

P

1.5. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran alur penelitian yang digambarkan berdasarkan dasar pemikiran peneliti yang bertujuan agar pembaca dapat mengetahui alur dari pemikiran peneliti.

1.6. Keluaran dan Manfaat Penelitian

Pada sub bab ini terbagi menjadi 2 (dua) pembahasan yang meliputi:

1.6.1. Keluaran Penelitian

Keluaran penelitian merupakan penjelasan terkait hasil dari penelitian yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini keluaran penelitian yang diharapkan meliputi:

1. Menghasilkan informasi bagaimana peran POKMAS serta tingkatan peran POKMAS dalam program pembangunan infrastruktur Kelurahan Bendo yang berupa data dari hasil survei mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam proses persiapan sampai proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Bendo, dan
2. Teridentifikasi persentase pengaruh dari peran POKMAS terhadap program pembangunan infrastruktur di Kelurahan Bendo.

1.6.2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian Pengaruh Peran Serta Kelompok Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Bendo, Kota Blitar dapat diketahui sebagai berikut.

1. Manfaat penelitian secara teoritis
Penelitian yang akan dilakukan dapat dijadikan petunjuk studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan pengetahuan, khususnya menyangkut masalah perencanaan pembangunan fisik maupun pembangunan kualitas masyarakat di suatu lingkungan,
2. Manfaat penelitian secara praktis
Hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat menjadi suatu bahan masukan bagi pemerintah kelurahan dan juga kelompok masyarakat dalam usaha meningkatkan peran kelompok masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur.
3. Manfaat penelitian secara akademis
Hasil dari penelitian dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.

1.7. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini merupakan penjelasan singkat terkait lingkup pembahasan dalam tiap-tiap bab. Dalam penelitian ini meliputi sistematika pembahasan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bagian pertama laporan yang menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, dan sistematika pembahasan.

BAB II KELUARAN DAN MANFAAT PENELITIAN

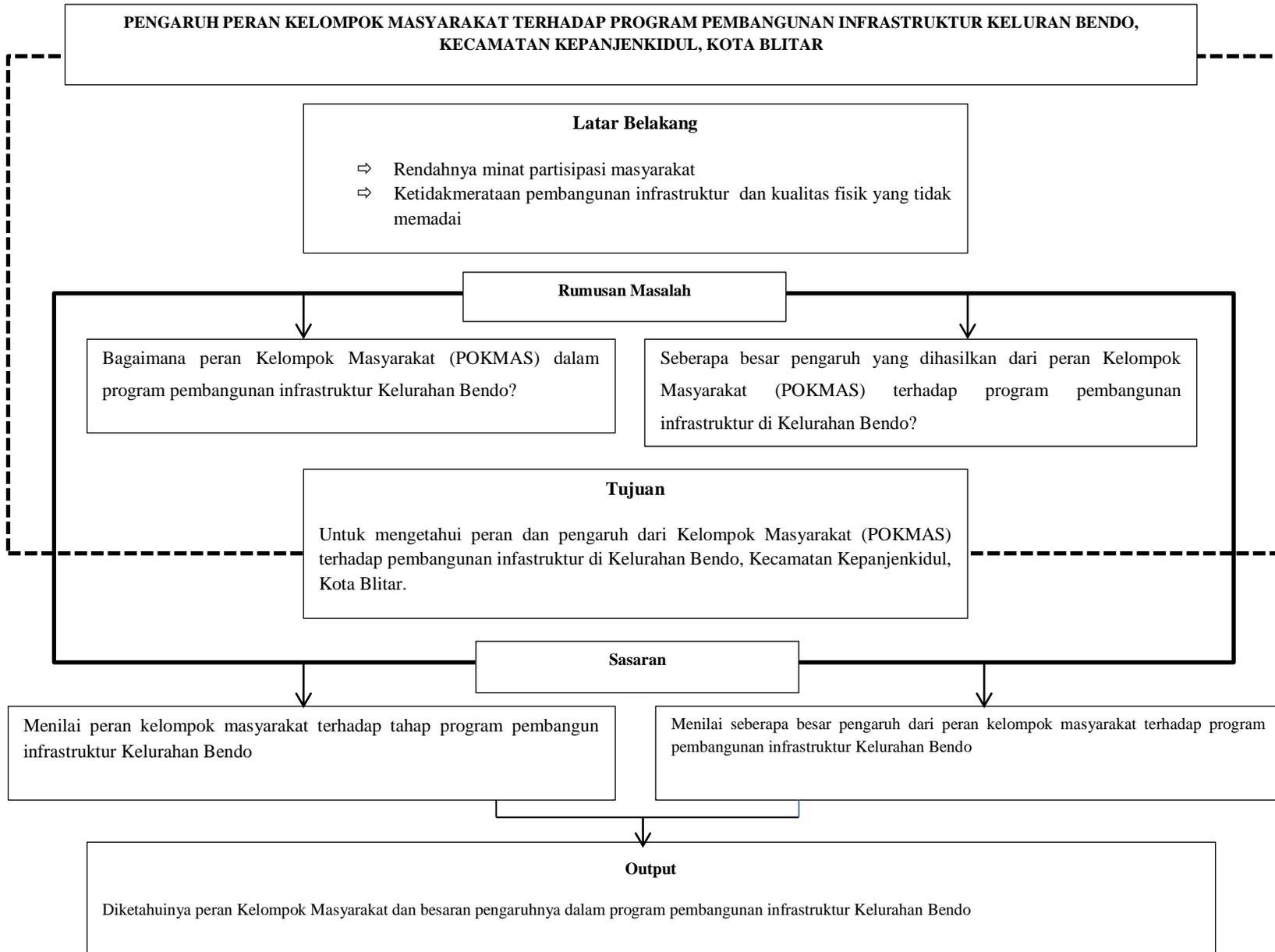
Merupakan bagian kedua laporan yang menjelaskan terkait keluaran dan manfaat yang dihasilkan dari penelitian.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bagian ketiga dalam laporan yang berisi teori-teori yang mendukung materi penelitian.

BAB IV METODE PENELITIAN

Merupakan bagian keempat dalam laporan yang menjelaskan terait metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.



Bagan 1. 1 Kerangka Pikir

Sumber: Peneliti, 2023